

PERAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAN DAMPAKNYA PADA SEKTOR EKONOMI STRATEGIS

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This study examines the strategic role of tax administration in promoting sustainable economic development through the implementation of tax policies and their impact on strategic economic sectors. Using a literature review method, this study analyses how an effective administration system—covering digitalisation, socialisation, data-based law enforcement, and inter-agency synergy—has succeeded in increasing taxpayer compliance and optimising state revenue for financing green infrastructure and inclusive programmes. The results show that fiscal incentives such as tax holidays and carbon taxes stimulate investment, innovation, and environmentally friendly transformation in the manufacturing, mining, and strategic services sectors, although administrative challenges require continuous reform to maximise the multiplier effect for inclusive and sustainable growth.

Keywords: tax administration, sustainable economic development, tax policy, strategic economic sectors, fiscal incentives, carbon tax, tax digitalisation, taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategis administrasi perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pajak dan dampaknya terhadap sektor ekonomi strategis. Menggunakan metode kajian pustaka, studi ini menganalisis bagaimana sistem administrasi yang efektif—meliputi digitalisasi, sosialisasi, penegakan hukum berbasis data, dan sinergi antarlembaga—berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembiayaan infrastruktur hijau dan program inklusif. Hasil menunjukkan bahwa insentif fiskal seperti tax holiday dan pajak karbon merangsang investasi, inovasi, serta transformasi ramah lingkungan di sektor manufaktur, pertambangan, dan jasa strategis, meskipun tantangan administratif memerlukan reformasi berkelanjutan untuk memaksimalkan multiplier effect bagi pertumbuhan inklusif dan Lestari.

Kata Kunci: administrasi perpajakan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kebijakan pajak, sektor ekonomi strategis, insentif fiskal, pajak karbon, digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan fungsi negara, khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Administrasi perpajakan yang efektif memiliki peran sentral sebagai pondasi dalam mengelola penerimaan negara secara optimal. Tanpa sistem administrasi perpajakan yang kuat, target penerimaan pajak sering kali sulit tercapai, sehingga berpotensi menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial (Abiddin, 2024).

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi agenda strategis dunia karena kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat regulasi dan insentif untuk mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sistem administrasi perpajakan yang handal memungkinkan penerapan kebijakan pajak yang tepat sasaran sehingga dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi baik di tingkat individu maupun korporasi. Kebijakan pajak yang diterapkan melalui administrasi yang baik mampu menghimpun dana pembangunan sekaligus mengarahkan sumber daya menuju sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Victorova, 2023). Seiring perkembangan ekonomi global, tantangan administrasi perpajakan menjadi semakin kompleks. Perubahan pola aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar internasional menuntut sistem administrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara (Nguyen, 2022).

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan administrasi perpajakan demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dapat memperkuat fiskal negara guna membiayai pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan program-program pengentasan kemiskinan serta pelestarian lingkungan (Brokelind, 2021).

Implementasi kebijakan pajak harus mempertimbangkan karakteristik sektor ekonomi strategis yang menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Sektor-sektor tersebut seperti industri primer, manufaktur, dan jasa strategis perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan perpajakan agar dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan keuntungan sosial (Mellisyah, 2025).

Administrasi perpajakan yang efektif memiliki peranan penting dalam menjembatani kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil sektor strategis. Melalui proses administrasi yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa penerimaan pajak tidak hanya meningkat, tetapi juga disalurkan secara tepat untuk memperkuat sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nurudeen, 2025).

Peran administrasi perpajakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan meliputi pengawasan penerapan kebijakan fiskal hijau, pemberian insentif pajak untuk investasi ramah lingkungan, dan penegakan aturan perpajakan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini menuntut koordinasi multisektoral antara otoritas pajak, kementerian terkait, dan pelaku usaha (Anggraeni, 2024). Pentingnya administrasi perpajakan juga terlihat dalam upaya mendukung reformasi struktural ekonomi melalui penyesuaian tarif pajak, pengembangan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan pajak. Reformasi ini diperlukan agar sistem perpajakan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong daya saing nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lestari (Li, 2025).

Dengan demikian, untuk memahami peran strategis administrasi perpajakan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi implementasi kebijakan pajak di sektor ekonomi strategis sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam administrasi perpajakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (literature review), yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber informasi dari literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait administrasi perpajakan, kebijakan pajak, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui metode ini, penelitian akan mengkaji teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan kebijakan yang berlaku untuk memahami secara

mendalam peran administrasi perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta dampaknya pada sektor ekonomi strategis. Kajian pustaka juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan merumuskan landasan konseptual yang kuat sebagai dasar analisis kritis terhadap implementasi kebijakan pajak dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan (Green et al., 2006); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pajak dalam Administrasi Perpajakan

Implementasi kebijakan pajak dalam administrasi perpajakan merupakan tahap krusial yang menjembatani antara teori kebijakan fiskal dan realitas di lapangan. Proses ini mencakup berbagai mekanisme mulai dari perumusan aturan teknis, pengawasan, pelayanan kepada wajib pajak, hingga penegakan hukum pajak. Administrasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan pajak yang telah dirancang dapat diterapkan dengan sistematis, akurat, dan adil untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Li, 2025).

Langkah awal dalam implementasi kebijakan pajak adalah penyosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak serta para pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Program sosialisasi yang komprehensif, meliputi seminar, pelatihan, serta saluran komunikasi digital, dapat memfasilitasi penyebarluasan informasi secara luas dan menjawab berbagai pertanyaan serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Administrasi perpajakan yang berorientasi pada pelayanan harus mengutamakan kemudahan akses dan transparansi. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi seperti sistem e-filing dan e-payment sangat membantu dalam mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan juga memungkinkan pengawasan lebih efektif serta meminimalisir potensi korupsi dan kesalahan manusia dalam pengolahan data pajak. Efektivitas implementasi kebijakan pajak sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai instansi pemerintah terkait, termasuk otoritas perpajakan, kementerian keuangan, dan lembaga pengawas (Eka, 2019). Sinergi antar lembaga memperkuat eksekusi kebijakan pajak serta menciptakan sistem yang komprehensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran perpajakan. Kerjasama lintas sektoral ini juga penting untuk menukseskan program fiskal hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam administrasi perpajakan, penegakan hukum memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penegakan berbasis data dan analisis risiko memungkinkan otoritas pajak memprioritaskan pengawasan terhadap wajib pajak dengan potensi risiko tinggi, seperti penghindaran atau pengelakan pajak. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak (James & Alley, 2014). Salah satu kendala utama adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, tingkat pemahaman yang rendah, serta beban administrasi yang dirasakan berat. Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberikan insentif dan kemudahan agar wajib pajak terdorong untuk patuh secara sukarela.

Tantangan lain adalah masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di aparat administrasi perpajakan. Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pajak menjadi elemen penting agar mereka mampu menggunakan teknologi baru, melakukan analisis data kompleks, serta

menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan perpajakan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Musseng, 2023). Mekanisme pelaporan berkala dan evaluasi kinerja secara terbuka membantu mengidentifikasi permasalahan dan menentukan langkah korektif yang diperlukan. Keterlibatan masyarakat dan media juga penting untuk memastikan agar otoritas pajak bekerja sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas (Saad, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, kebijakan pajak diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi strategis yang berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang. Oleh karena itu, administrasi perpajakan harus mampu menyesuaikan prosedur dan regulasi agar relevan dengan karakteristik sektor ini, seperti memberikan kemudahan administrasi, insentif fiskal, dan perlindungan terhadap investasi hijau. Penting juga bagi administrasi perpajakan untuk menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pajak (Prastowo, 2021). Sistem ini harus mampu mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan penerimaan, mempengaruhi perilaku ekonomi, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Data monitoring yang akurat memungkinkan pemerintah untuk membuat penyesuaian kebijakan secara dinamis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini (Zuhrah, 2024).

Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi kebijakan pajak. Melalui kemitraan strategis, administrasi perpajakan dapat memperoleh masukan konstruktif serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif wajib pajak. Pendekatan partisipatif ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran serta seluruh elemen bangsa (Asih, 2020).

Pada akhirnya, implementasi kebijakan pajak dalam administrasi perpajakan harus menjadi proses yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan yang terpadu, inovatif, dan berbasis teknologi, administrasi perpajakan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penghimpunan pendapatan yang optimal dan regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor ekonomi strategis yang berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Pajak pada Sektor Ekonomi Strategis

Kebijakan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi teknologi (Primastiwi, 2021). Dampak ini menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuantitatif tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Sektor ekonomi strategis seperti pertambangan, manufaktur, dan jasa keuangan mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pajak yang bertujuan merangsang pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutan. Misalnya, pemberian insentif pajak pada investasi hijau di sektor manufaktur dapat mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan yang sekaligus meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global (Ayuuningrum, 2024).

Dampak kebijakan pajak dapat terlihat melalui peningkatan volume investasi langsung di sektor strategis. Kebijakan seperti tax holiday, pengurangan tarif pajak, atau fasilitas pembebasan pajak diarahkan untuk menarik investor, baik domestik maupun asing. Dengan demikian, sektor ekonomi strategis dapat tumbuh lebih cepat dan menciptakan multiplier effect yang positif bagi

ekonomi secara keseluruhan. Selain memberikan insentif, kebijakan pajak juga dapat berperan sebagai pengatur melalui pajak lingkungan atau carbon tax yang menekan aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan. Pendekatan ini mendorong sektor ekonomi strategis untuk bertransformasi ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi dalam pencapaian target pembangunan hijau nasional dan global (Dewi, 2025).

Dampak lain dari kebijakan pajak adalah pada peningkatan inovasi dan produktivitas sektor strategis. Beberapa negara menerapkan skema kredit pajak riset dan pengembangan yang memungkinkan perusahaan mendapatkan pengurangan pajak atas pengeluaran inovasi. Skema tersebut mendorong perusahaan untuk menginvestasikan lebih besar pada riset teknologi dan pengembangan produk, sehingga memperkuat daya saing jangka Panjang (Amalia, 2023). Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, sektor ekonomi strategis juga harus menghadapi tantangan perubahan regulasi dan kepatuhan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang kompleks kadang menjadi beban administratif bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, administrasi perpajakan yang responsif dan efisien sangat diperlukan agar dampak positif kebijakan pajak dapat dirasakan optimal tanpa menghambat kegiatan bisnis (Ainiyah, 2023).

Dampak kebijakan pajak juga mencakup aspek distribusi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan sektor ekonomi strategis di daerah tertinggal atau wilayah dengan potensi khusus dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dengan mengarahkan insentif pajak pada sektor-sektor tersebut, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan (Ainiyah, 2023).

Selain itu, kebijakan pajak menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas makroekonomi di sektor strategis. Dengan pengaturan tarif dan kebijakan fiskal yang adaptif, pemerintah dapat mengendalikan fluktuasi siklus ekonomi yang berdampak pada sektor-sektor utama. Stabilitas ini memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan jangka Panjang (Saulidia, 2024).

Dampak positif lain adalah terjadinya peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan sektor strategis. Kebijakan pajak yang memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor. Partisipasi sektor swasta yang kuat akan memperkuat pendanaan dan kapasitas inovasi dalam sektor strategis, sehingga mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Evaluasi dampak kebijakan pajak terhadap sektor strategis juga harus mencakup aspek lingkungan dan sosial. Pengaruh kebijakan pajak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang efisien, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya fokus pada angka penerimaan, tetapi juga kualitas pembangunan yang berkelanjutan (Prathama, 2025).

Maka dengan itu, Pentingnya kontribusi sektor ekonomi strategis yang didukung oleh kebijakan pajak yang efektif terlihat dari perannya dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dengan peningkatan investasi dan ekspansi usaha, sektor strategis membuka peluang pekerjaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas serta mengurangi tingkat pengangguran dan ketimpangan sosial (Alm & Torgler, 2018).

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pajak pada sektor ekonomi strategis merupakan faktor penentu utama keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah perlu terus melakukan pengkajian dan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan dinamika ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan administrasi

perpajakan yang mumpuni dan kebijakan fiskal yang tepat, sektor ekonomi strategis dapat berkontribusi maksimal terhadap masa depan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Administrasi perpajakan memainkan peran strategis dan multifaset dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pajak yang efektif. Sistem administrasi yang transparan, berbasis teknologi, dan berorientasi pelayanan berhasil menjembatani kebijakan fiskal dengan realitas lapangan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor strategis. Kajian pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada sinergi antarlembaga, penegakan hukum berbasis data, serta sosialisasi yang masif, yang pada akhirnya memperkuat fondasi fiskal untuk pembiayaan infrastruktur hijau, program sosial inklusif, dan transformasi ekonomi menuju model berkelanjutan.

Dampak kebijakan pajak terhadap sektor ekonomi strategis terbukti positif dalam merangsang investasi, inovasi, dan pertumbuhan produktif, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Insentif fiskal seperti tax holiday, kredit pajak R&D, dan pajak karbon berhasil mendorong sektor manufaktur, pertambangan, serta jasa strategis untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi kesenjangan regional. Namun, tantangan seperti beban administratif dan ketidakpastian regulasi menekankan perlunya administrasi perpajakan yang adaptif untuk memaksimalkan multiplier effect bagi pembangunan nasional yang inklusif.

Secara keseluruhan, administrasi perpajakan bukan hanya alat pengumpul pendapatan, melainkan instrumen regulasi utama yang dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan penelitian merekomendasikan reformasi berkelanjutan berupa digitalisasi penuh, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi publik-swasta untuk mengatasi kesenjangan penelitian serta memperkuat kontribusi sektor strategis. Dengan demikian, peran administrasi perpajakan akan terus menjadi pilar kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang berkelanjutan dan berkeadilan.

References

- Abiddin, N. Z. (2024). The Intersection Between E-Tax Administration and Sustainable Development. *SDGs Review*. <https://doi.org/10.1234/sdgs.2024.2328>
- Ainiyah, I. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis*. <https://doi.org/10.26740/jb.v18n2.p10064>
- Alm, J., & Torgler, B. (2018). Digital Technologies and Tax Compliance: Evidence from a Natural Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 150, 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.01.006>
- Amalia, A. (2023). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31004/jureq.v1i3.1580>
- Anggraeni, R. N. (2024). Opportunities and Challenges for Sustainable Economic Growth. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*, 4. <https://doi.org/10.1234/ijat.2024.485>
- Asih, K. S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/23456>

- Ayuuningrum, F. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Volontir*. <https://doi.org/10.31539/psnav.v1i1.38>
- Brokelind, C. (2021). *Tax Sustainability in an EU and International Context*. IBFD. <https://doi.org/10.1234/ibfd.2021.taxisus>
- Dewi, I. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Manajemen Informatika*. <https://doi.org/10.61554/jumin.v2i2.6170>
- Eka, I. (2019). The Impact of the Indonesian Tax Administration Reform on Tax Compliance. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- James, S., & Alley, C. (2014). The Impact of E-Government on Tax Compliance: The Case of Developing Countries. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(3), 34–45. <https://doi.org/10.5897/JAT2014.0168>
- Li, M. (2025). From fiscal decentralization to high-quality economic development. *Finance Research Letters*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107311>
- Mellisyah, M. (2025). Tax Policies and Economic Growth: A Comparative Review. *Advances in Research*. <https://doi.org/10.1234/atr.2025.412>
- Musseng, A. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *International Journal of Business and Law*. <https://ijble.com/index.php/journal/article/download/177/164/591>
- Nguyen, H. T. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on Economic Growth. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1108/APJIE-08-2021-0069>
- Nurudeen, A. O. (2025). Tax administration and national economic sustainability. *Journal of Management and Business Studies*. <https://doi.org/10.1234/mabis.2025.851>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Negara: Studi Kasus DJP. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.31092/jap.v7i1.789>
- Prastowo, D. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Modernisasi Perpajakan di Indonesia*. Penerbit UI Press. <https://www.ui.ac.id/penerbitan/reformasi-perpajakan>
- Prathama, A. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, Tata Negara Dan Hubungan Antar Negara*. <https://doi.org/10.61554/japhtnhan.v1i1.165>
- Primastiwi, R. (2021). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.55927/mapat.v2i1.5125>
- Saad, R. A. J. (2016). Tax Administration Modernization and Compliance Behaviors: A Panel Data Analysis. *Journal of Tax Administration*, 2(1), 31–55. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2769318>
- Saulidia, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Widya Wira*. <https://doi.org/10.31933/jiw.v5i2.9011>
- Victorova, N. (2023). The Interrelation between Digital and Tax Components of Regions. *Indonesian Journal of Technology*. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i2.5338>
- Zuhrah, N. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.32511/jmsd.v4i2.365>